



Peran Pemuda Mengisi Kemerdekaan Bangsa Melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan

Nyoto*¹, Rebecca La Volla Nyoto², Nicholas Renaldo³, Intan Purnama⁴

^{1,3,4}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, ²Universitas Lancang Kuning

*e-mail: nyoto@lecturer.pelitaindonesia.ac.id¹

Abstract

Entering the era of globalization, the tendency of the human soul to be influenced by cyber-digital games is stronger, so that everyone can access information anywhere. This limitation causes one of the main functions of upholding national sovereignty to be about a sense of nationalism towards their own people. The role of youth is needed so that they can become the pillars of national development. The purpose of this activity is to maintain and foster a spirit of nationalism for Indonesian youth. The method of activity carried out is through face-to-face seminars. The desired hope is the growth of a sense of nationality towards the unitary state of the Republic of Indonesia.

Keywords: *nationalism insight, nationalism, the role of youth*

Abstrak

Memasuki era globalisasi, kecenderungan jiwa manusia dipengaruhi oleh permainan cyber digital lebih kuat, sehingga setiap orang bisa mengakses informasi yang ada di mana saja. Ketidakterbatasan ini menyebabkan salah satu fungsi pokok penegakan kedaulatan bangsa adalah tentang rasa nasionalisme terhadap bangsanya sendiri. Peran pemuda sangat dibutuhkan sehingga mampu menjadi penopang pembangunan bangsa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempertahankan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme kebangsaan pemuda Indonesia. Adapun metode kegiatan yang dilakukan adalah melalui seminar tatap muka. Harapan yang diinginkan adalah terjadinya penumbuhan rasa kebangsaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: wawasan kebangsaan, nasionalisme, peran pemuda

1. PENDAHULUAN

Tonggak waktu terbentuknya bangsa Indonesia tentu saja 17 Agustus 1945, dimana Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan proklamasi oleh *founding father* Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta yang kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pertama. Sejak itu para ahli sejarah menandai masa kekuasaan Presiden Soekarno sebagai Pemerintahan Orde Lama. Hal yang menarik dari pembentukan sejarah kebangsaan Indonesia adalah ketika awal tahun 1900an, dimana mulai muncul para pelajar Indonesia yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda (HIS, MULO, HCS, AMS, dan lainnya), bahkan beberapa pelajar bumiputra yang beruntung dikirim belajar ke negeri Belanda. Kita mengenal sosok Mohd. Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan lainnya pernah belajar di negeri Belanda. Kita kemudian mengenal sosok-sosok ini sebagai tokoh pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia (Graaf, 1997).

Dari dalam negeri, ada banyak pelajar yang bersekolah di STOVIA yaitu sekolah kedokteran bagi rakyat pribumi di Batavia. Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, STOVIA dalam perjalanan sejarahnya sejak 2 Februari 1950, Pemerintah Republik Indonesia mengubahnya menjadi Fakultas Kedokteran Universitas



Indonesia, yang masih tetap berlaku hingga sekarang. Namun hal ikhwal terpenting adalah munculnya tokoh tokoh yang dikemudian hari mampu membawa arah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dari tokoh-tokoh pemuda dan pelajar kemudian kita mengenal adanya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres kedua ini diselenggarakan selama dua hari. Ketua Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyopuspito (PPPI) dan wakilnya Joko Marsaid (Jong Java). Kongres pemuda hari pertama diselenggarakan di gedung Katholikee Jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katolik). Hari kedua di gedung Oost Java (sekarang di Medan Merdeka Utara Nomor 14) (Pusponegoro & Notosusanto, 2019). Desakan-desakan Pemuda Indonesia untuk bangkit dari tekanan kolonialisme terus digulirkan hingga pada masa pendudukan Jepang. Pemuda Indonesia mendapat banyak didikan militer dari tentara Jepang, kita mengenal adanya tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) yang kemudian hari menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Secara sistematis dan konsisten, pemerintah Orde Baru telah membatasi, menekan dan menghancurkan hak-hak politik etnis Tionghoa dengan merangka dasar-dasar diskriminatif yang sangat mengucilkan etnis Tionghoa di Indonesia menjadi alat politik sehingga tidak ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa dalam pemerintahan atau badan legislatif pada waktu itu. Hal ini didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dalam kempen anti-komunis telah menyamakan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang cenderung atau bersimpati terhadap komunisme (Setiono, 2002).

Selain itu, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, etnis Tionghoa dikucilkan daripada kegiatan politik. Penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan sebagian besar orang yang dikenal pasti sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia termasuk tokoh-tokoh Baperki dan organisasi-organisasi Tionghoa lainnya, telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan dalam kalangan masyarakat etnis Tionghoa (Siau, 1999). Sistem politik yang diterapkan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru itu memang terasa di mana-mana selama lebih dari 30 tahun. Sistem politik yang dijalankan itu sekaligus membawa kesan positif dan kesan negatif yang besar terhadap warganya, terutama etnis Tionghoa.

2. METODE

Oleh karena sudah adanya kelonggaran yang diberikan pemerintah dalam hal pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat (PPKM), maka acara ini dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 bertempat di hotel Furaya Pekanbaru. Acara ini diikuti oleh para peserta guru, siswa tingkat SLTA dari beberapa sekolah yang ada di Pekanbaru beserta beberapa anggota organisasi kemasyarakatan (Ormas Tionghoa). Waktu pelaksanaan pukul 09.00 pagi hingga 12.00 WIB siang hari. Kegiatan ini diharapkan setelah mengikuti seminar ini dapat memberikan penguatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan sehingga rasa cinta tanah air semakin kuat, loyalitas kebangsaan semakin tinggi.

Adapun mekanisme dalam mengikuti seminar wawasan kebangsaan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi kehadiran dan jumlah yang hadir (maksimal 3 orang) untuk satu sekolah atau organisasi kemasyarakatan.



2. Hadir pada waktu yang ditentukan dan melakukan pengisian daftar hadir.
3. Pakaian yang dikenakan adalah pakaian seragam sekolah masing-masing atau ormas masing-masing.
4. Mengikuti acara dengan baik hingga selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunikan peran (terutama sosial, budaya, ekonomi, dan politik) etnis Tionghoa di Indonesia ini digambarkan dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Namun, terlalu banyak fakta sejarah Indonesia, khususnya sejarah tentang minoritas etnis Tionghoa yang disembunyikan, terutama selama masa kekuasaan pemerintah Orde Baru. Termasuk "politik kesengajaan" ciptaan pemerintah Orde Baru, yang di kemudian hari melabel sebagian orang etnis Tionghoa sebagai *binatang ekonomi* (Yudohusodo, 1996).

Pada umumnya, para peniaga Tionghoa adalah peniaga perantara dan jauh dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), malahan merekalah yang selalu menjadi mangsa pemerasan para birokrat dan preman. Dalam setiap tindakan kerusuhan, merekalah yang selalu menjadi mangsa rompak dan kemusnahan. Pada masa itu, catatan sejarah cenderung terperangkap dalam minda pemerintah Orde Baru yang melihat warga Tionghoa sebagai *masalah Cina*, yaitu masalah politik yang pada awalnya diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda ketika menghadapi gerakan arus nasionalisme Tionghoa di tanah jajahan. Penderitaan oleh minoritas Tionghoa di bawah pemerintah Orde Baru ini tidak hanya larangan untuk mengekspresikan diri dan identiti "keTionghoan" mereka, tetapi juga tentang persejarahan Indonesia.

Bagi memahami tentang tempat, sikap, dan kedudukan suatu minoritas, tidak ada jalan lain kecuali mendalami pengertian tentang evolusi minoritas etnis tersebut. Hal ini dimaksudkan agar semakin jelas kerumitan struktur, konflik internal dan konflik eksternal, hubungannya dengan segala variasinya dengan mayoritas, dan konsekuensi pada perubahan definisinya sebagai minoritas.

Tanpa kesungguhan ini, minoritas dan juga mayoritas terus saja digambarkan secara sangat mudah, yang seringkali penuh dengan kebencian, caci maki, dan prasangka yang dimaksudkan untuk mengasingkan minoritas dan menghilangkan unsur kemanusiaannya. Satu hal yang pada dasarnya dimaksudkan adalah membekukan secara besar-besaran status sosial-politik kelompok tersebut sebagai minoritas.

Namun, hubungan antara pemerintah dengan para pengusaha besar asal Tionghoa menjadikan mereka mendapat tempat yang layak dalam kalangan birokrasi pemerintah, dan sedikit mempengaruhi fundamental pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Sebelum akhirnya Orde Baru yang tumbang pada Mei 1998, dan berganti kepada era reformasi, muncul pula kepemimpinan Tionghoa peranakan yang sukses menjadi menteri yang paling strategik yaitu Kwik Kian-Gie. Kwik Kian-Gie ialah sosok warga Tionghoa yang berhasil menjawat jawatan di jabatan strategik semasa pemerintahan Megawati Soekarno Putri pasca reformasi.



Warga Tionghoa memiliki loyaliti terhadap Indonesia, dan hal ini terbukti daripada sikap mereka turut dalam memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Tionghoa peranakan terutama, sudah lama berkecimpung di tengah arus pasaran bebas. Selain itu, cukup banyaknya warga Tionghoa yang mampu berasimilasi dalam kehidupan mereka dalam masyarakat, hidup bersatu padu dengan masyarakat Indonesia mendukung kedaulatan negara Indonesia dengan bersedia menjadi warganegara Indonesia dengan menggunakan syarat yang telah dibuat oleh pihak pemerintah.

Kesetiaan etnis Tionghoa nampak pada kesediaan mereka menggunakan bahasa Indonesia dan segala sifat-sifat nasional Indonesia serta masuk pada pendidikan yang bercampur dengan non Tionghoa. Ada juga antara mereka yang enggan bersekolah di sekolah negeri dan lebih memilih sekolah swasta, yang diketahui hanya merupakan bentuk pencarian ke arah "kualitas" pendidikan formal. Saat ini, tidak ada yang mesti dikhawatirkan mengenai keadaan warga Tionghoa yang sudah puluhan tahun berpengalaman hidup di negara Indonesia.

Loyalitas tidak semata-mata diukur dengan kemampuan mereka mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun Tionghoa menjadi sebuah unsur terpenting dalam proses pembangunan bangsa Indonesia ke arah perubahan dan kebaikan. Hal ini sebagian daripada merupakan proses mengisi pembangunan di Indonesia, daripada aspek ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tionghoa menjadi entitas yang utuh dalam kebudayaan Indonesia, sebagai bagian berbagai budaya dalam bangsa.

Pada masa Orde Baru, dilakukan penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih popular disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada warganegara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa berserta keturunan-keturunannya (Kwiek & Madjid, 1998). Walaupun ketentuan sekarang telah dihapus, secara prinsip penerapan SBKRI sama artinya dengan usaha yang menempatkan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa pada kedudukan status undang-undang WNI yang di[er]masalahkan. Pada Orde Baru, warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warganegara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga non Tionghoa, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.

Nasionalisme Tionghoa yang termasuk juga daripada peranakan, tumbuh terpisah dan dikehendaki pemerintah Indonesia pemerintah Orde Baru dengan dasar asimilasinya. Dari segi kecenderungan untuk mempertahankan identitas etnisnya memang terdapat pada sebagian warga etnis Tionghoa. Dari segi yang lain pula, mereka telah menjadi sebagian daripada masyarakat Indonesia. Nasionalisme Indonesia dibangun berdasarkan konsep kenon Tionghoan (*indigenism*), dan etnis Tionghoa dikategorikan sebagai orang asing atau Vreemde Oosterlingen (Foreign Oriental) yang dianggap bukan merupakan sebagian daripada bangsa Indonesia. Dasar ini ditandai dengan penghapusan kebudayaan Tionghoa, termasuk penutupan sekolah Tionghoa, pembubaran organisasi etnis Tionghoa dan pembredelan penerbitan media massa berbahasa Tionghoa serta simbol-simbol dan adat-istiadat etnis Tionghoa.



Gambar 1. Pemberian Materi Seminar Peran Pemuda Dalam Wawasan Kebangsaan
Source: PSMTI Provinsi Riau (2022)

Banyak sekali bentuk-bentuk diskriminasi kepada etnis Tionghoa ketika sebelum reformasi terjadi. Pemerintah Orde Baru juga melarang penggunaan bahasa dan aksara Tionghoa serta larangan merayakan ritual agama, budaya dan tradisi Tionghoa. Pada masa Orde Baru juga terdapat segelintir peniaga Tionghoa yang dijadikan kroni oleh para penguasa untuk mengumpulkan kekayaan. Kesenian tarian singa barongsai secara terbuka, perayaan hari raya tahun baru Imlek dan pemakaian bahasa Mandarin dilarang. Kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena larangan itu sama sekali akan memberi kesan pada resep obat yang mereka buat yang hanya boleh ditulis dalam bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia pada masa itu memberi izin dengan catatan bahwa etnis Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Kerusuhan Mei 1998, juga berpengaruh pada sikap anti etnis Tionghoa terutama yang memiliki perniagaan. Orang Tionghoa yang trauma akibat kerusuhan Mei 1998, banyak yang lari keluar negeri, dan sebagian ada yang membawa modal ke luar negeri. Usaha-usaha perniagaan etnis Tionghoa di bandar-bandar besar banyak yang vakum, dan baru mulai bangkit setelah ada jaminan keamanan daripada Presiden Habibie. Kegiatan ekonomi etnis Tionghoa hanya menunggu perkembangan keadaan. Reformasi yang dilancarkan pada tahun 1998 telah banyak menyebabkan perubahan kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Walaupun belum 100 persen perubahan tersebut terjadi, namun hal ini sudah menunjukkan bahwa adanya trend perubahan pandangan pemerintah dan warga non Tionghoa terhadap masyarakat Tionghoa. Semasa Orde Baru segala aksara, budaya, ataupun daya tarikan etnis Tionghoa dilarang dipertontonkan di khalayak, tetapi ketika ini hal itu telah menjadi tontonan umum (Suryadinata, 1999).

Sejak terjadinya tragedi Mei 1998 dan runtuhnya Pemerintah Orde Baru serta bermula era reformasi, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan sosial politik orang-orang Tionghoa di Indonesia. Pelbagai peristiwa tersebut menimbulkan kesedaran dalam kalangan etnis Tionghoa bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan mereka. Tidak memiliki hak untuk dipilih juga merupakan salah satu cara politik pada masa pemerintah Orde Baru, agar masyarakat tetap



menjadi pelaku ekonomi yang tidak pernah akan mengenal dunia politik. Dengan keberhasilannya dalam bidang ekonomi, selama ini warga Tionghoa selalu dianggap sebagai “kelompok dominan”, walaupun secara politik, aspirasi dan kepentingannya selalu terpinggir. Dengan keadaan politik yang dialami oleh etnis Tionghoa selama 30 tahun lalu timbul keinginan yang kuat dalam kalangan warga Tionghoa untuk mempunyai perwakilan yang bisa mewakili aspirasi dan kepentingan politik warga Tionghoa.

Persoalan-persoalan kebangsaan menyangkut etnis Tionghoa di atas, ketika kran reformasi dibuka, maka muncullah pemikiran-pemikiran para tokoh Tionghoa diantaranya Anton Haliman, Brigjen (Pur) Tedy Jusuf, Eddy Sadeli, Ernawati Sugondo, Kamil Setiadi, I.G. Hertanto T. Surya, Suyapto Tandyawesa, Layto Wijaya, Budiman, Teddy Sugianto, Yenni Thamrin, Hendra Suryana, Ronald Syarif, dan Karta Winata yang berjumlah 14 orang dianggap sebagai pendiri PSMTI. Oleh karena itu melalui berbagai proses kemudian melalui 14 orang pendiri, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) dideklarasikan di Gedung Sigala-gala Sunter dan dihadiri lebih dari 1000 orang. 28 September 1998 tepatnya 4 bulan setelah kerusuhan Mei 1998, PSMTI didirikan dan sebagai ketua umum pertama terpilih Brigjen (Pur) Tedy Jusuf. Dan selanjutnya kita mengetahui PSMTI terus mengembangkan sayapnya hingga hampir diseluruh provinsi tanah air, dan salah satunya PSMTI Riau.

Berbicara tentang wawasan kebangsaan, hal itu relasi kuat dengan nilai-nilai dasar bela negara. Setidaknya, ada 3 poin penting yang bisa dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

Pertama, Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.

Ketiga, Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Ada yang mengatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri. Dilihat dari suatu manajemen suatu organisasi, maka unsur manusia merupakan unsur yang paling utama dibandingkan unsur-unsur lainnya seperti: uang (*money*), metode kerja (*method*), mesin (*machine*), perlengkapan (*material*) dan pasar (*market*), dikatakan demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa adanya daya guna, manfaat, dan peran unsur-unsur, hanya dimungkinkan apabila unsur manusia mempunyai, memiliki daya/kekuatan untuk memberdayakan berbagai unsur dimaksud sehingga masing-masing unsur dapat memberi hasil, manfaat, daya guna, dan



peran dalam manajemen tersebut.

Demikian juga halnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tergantung pada peran pemuda dimana diketahui bahwa pemuda adalah tiang bangsa yang saat ini dengan populasi tertinggi.

Dalam hubungan ini diperlukan pemuda yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berhasil guna, bersih, profesionalisme, dan akuntabel dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat.

Untuk menegakkan "tiang bangsa", maka harus ada upaya untuk membangun karakter bangsa (*character nation building*) yang digambarkan sebagai hal berikut:

1. Merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan kebersamaan.
2. Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila.

Upaya membangun karakter bangsa pada hakekatnya adalah agar masyarakat sesuatu bangsa memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Adanya perilaku saling menghormati dan menghargai di antara sesama.
- b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong (tepo seliro);
- c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
- d. Adanya rasa peduli dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Adanya moral, ahklak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama;
- f. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan;
- g. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

Implementasi karakter bangsa terhadap pandangan wawasan kebangsaan, maka seharusnya hal itu dapat dikenali melalui, hal berikut:

1. Karakter yang bersifat positif yaitu sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Karakter yang bersifat negatif; dalam hal ini biasanya berupa tabiat, watak, dan perilaku yang bertentangan dengan norma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Gambar 2. Para Peserta Seminar Peran Pemuda Dalam Wawasan Kebangsaan
Source: PSMTI Provinsi Riau (2022)

4. KESIMPULAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai nilai-nilai perjuangan para pejuangnya, terutama pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan peran pemuda sebagai tonggak bangsa dalam mengisi kemerdekaan, baik melalui pendidikan, prestasi, sosial budaya, kemandirian, dan berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka perlu ditanamkan wawasan kebangsaan sehingga seluruh komponen bangsa termasuk para pemuda mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan yang dipahami dan dijalankan sebagai tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu membawa kemajuan bangsa terutama dalam hal toleransi kehidupan sosial, toleransi berama, dan hidup rukun antar bangsa.

Juga, etnis Tionghoa Indonesia adalah bagian penting masyarakat bangsa ini sehingga mereka juga memiliki peran penting dalam memajukan bangsa ini melalui perilaku-perilaku positif; misalnya menghidupkan perekonomian bangsa, memajukan pendidikan, mensejahterahkan bangsa melalui semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, etnis Tionghoa juga adalah bagian dari suku bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan nilai-nilai perjuangan mereka sebelumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) Provinsi Riau, panitia penyelenggara seminar peran pemuda dalam wawasan kebangsaan yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini serta kepada peserta yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir mengikuti acara tersebut. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan rasa nasionalisme yang lebih kuat terhadap negara yang kita cintai ini, Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Graaf, H. J. (1997). *Muslim Cina di Jawa Abad XV dan XVI: Antara Historisitas dan Mitos*. Tiara Wacana.
- Kwiek, K. G., & Madjid, N. (1998). *Masalah Pri Dan Non Pri Dewasa Ini*. Pusaka Sinar Harapan.
- Pusponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid I* Vol. VI. Balai Pustaka.
[repository.uksw.edu/bitstream/123456789/12390/3/T2_752013009_BAB III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/12390/3/T2_752013009_BAB%20III.pdf)
- Setiono, B. G. (2002). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Elkasa.
- Siau, T. J. (1999). *Siau Giok Tjhan Pejuang Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia Dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Hasta Mitra.
- Suryadinata, L. (1999). *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. LP3ES.
- Yudohusodo, S. (1996). *Warga Baru: Kasus Cina di Indonesia*.